

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tesis ini fokus pada pembahasan serangan teroris terhadap Amerika Serikat dalam Tragedi 11 September tahun 2001 (9/11), yang telah menghancurkan Gedung *World Trade Center* di New York dan Gedung Pentagon di Washington. Dan merupakan sebagai simbol kekuatan militer Amerika Serikat,¹ Amerika Serikat adalah Negara korban terorisme internasional. Tragedi 9/11, telah menimbulkan trauma psikologis bagi warga negara Amerika Serikat yang disebabkan oleh aksi terror, dan menjadi wacana terhadap mereka bagaimana Tragedi itu dapat terjadi di negaranya, oleh karena itu mereka menuntut kepada kebijakan pemerintah dan harus ada garansi bahwa peristiwa ini tidak akan terulang kembali lagi. Dimana pelaku peristiwa tersebut adalah jaringan terorisme Al-Qaeda yang pernah dipimpin oleh Osama bin Laden.² Dan memiliki keterkaitan dengan kelompok *Abu Sayyaf Group* di Filipina Selatan yang berlokasi di Kepulauan Sulu dan Mindanao.

¹ Adirini Pujayanti, "Kebijakan Luar Negeri Pemerintahan Bush Terhadap Terorisme Internasional". Dalam Poltak Pargi Nainggilan, Terorisme, Human Security, Keamanan Internasional dan Tata Dunia Pasca Perang Dingin, Terorisme dan Tata Dunia Baru, Jakarta: Pusat Pengkajian dan Pelayanan Infomasi Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, hal.161, 2002

² Briscoe, C.H. "Balikatan exercise spearheaded ARSOF operations in the Philippines." Special Warfare, Sept.2004, elibraryusa.state.gov/primo?url=http://go.galegroup.com/ps/i.do?p=AONE&sw=w&u=wash89460&v=2.1&id=GALE%7CA126198613&it=r&asid=6ccf2befea6b84c03d00fbac70d19642, Internet (diakses tanggal 13 September 2016)

Tragedi 9/11 merupakan acaman bagi keamanan Amerika Serikat, karena adanya ancaman bagi keamanan negaranya, presiden George Walker Bush (Bush) mengeluarkan *National Security Strategy* (NSS) tahun 2002,³ atau “*war on terrorisme*”, dimana Amerika Serikat mengajak sejumlah negara-negara di dunia untuk memerangi terorisme demi kepentingan keamanan global bersama. Salah satu negara yang diajak untuk melakukan kerjasama dalam memerangi terorisme adalah Filipina. Filipina merupakan salah satu negara kawasan Asia Tenggara yang dijadikan oleh Amerika Serikat dalam memerangi terorisme, karena di negara Filipina terdapat sejumlah kelompok terror yang salah satunya adalah *Abu Sayyaf Group*. *Abu Sayyaf Group* kerap terlibat dalam berbagai aksi terror, seperti pemboman, pembunuhan, penculikan maupun penyanderaan dan pemerasan.⁴ Hal itu tentu sangat meresahkan bagi masyarakat dan pemerintah Filipina yang tidak jarang juga menimbulkan banyak korban. Seperti kasus penyanderaan terhadap warga negara Amerika Serikat, Jeffrey Schilling yang diculik *Abu Sayyaf Group* pada 28 Agustus 2000 di Filipina.⁵ Dan penculikan dilakukan lagi pada bulan Mei 2001, terhadap 20 orang, dan telah membunuh satu dari 3 sandera asal Amerika Serikat dengan cara memenggal kepalanya.⁶ Pada

³ The National Security Strategy USA: <http://www.state.gov/documents/organization/63562.pdf>, hal.1, 2002, Internet (diakses tanggal 13September 2016)

⁴ Abu Sayyaf Group “*Philippines, Islamist separatists*”: <http://www.cfr.org/philippines/abu-sayyafgroup-philippines-islamist-separatists/p9235> Internet (diakses tanggal 27 Agustus 2016)

⁵ Inilah 15 Bukti Kekejaman Kelompok Abu Sayyaf “*Tidak Segan Penggal Kepala Sandera*”, didapat dari: <http://kaltim.tribunnews.com/2016/04/08/inilah-bukti-sadisme-kelompok-abu-sayyaf-tidak-segan-penggal-kepala-sandera?page=4>, Internet (diakses tanggal 28 Agustus 2016)

⁶ Jejak Berdarah Penyanderaan Kelompok Abu Sayyaf, didapat dari: <http://news.detik.com/berita/3176560/jejak->

akhir tahun 2001, *Abu Sayyaf Group* masih membawa 2 sandera warga negara Amerika Serikat yaitu pasangan Martin dan Gracia Burnham serta seorang perawat warga negara Filipina bernama Ediborah Yap.⁷

Setelah Tragedi 9/11, *Abu Sayyaf Group* dianggap sebagai organisasi teroris oleh Amerika Serikat karena berbagai aksi-aksi tindakan terror dan diduga berafiliasi dengan jaringan teroris Al-Qaeda yang menjadi pelaku utama Tragedi 9/11. Dimana ada dugaan bahwa kemungkinan dari kedua kelompok ini menjalin hubungan untuk melakukan aksi kejahatan transnasional serta hubungan dengan kelompok-kelompok terorisme lain untuk bertemu dalam mencapai kepentingan dan tujuan mereka. Melihat dari adanya keterkaitan dari kelompok-kelompok tersebut yang terorganisasi, menjadikan ini tidak sebatas berkaitan dengan ketertiban, namun juga perlu penerapan keamanan.⁸

Isu terorisme, umumnya tidak hanya sebatas muncul dari wilayah regional tertentu saja seperti di Timur Tengah, namun telah menyebar ke wilayah-wilayah regional lainnya yang memiliki potensi konflik dan instabilitas. Filipina juga merupakan negara yang bisa saja memancing jaringan kelompok terorisme internasional lain untuk berafiliasi dengan kelompok di negaranya dan melakukan aksi-aksi terror yang lebih meluas,

berdarah-penyanderaan-kelompok-abu-sayyaf,Internet (diakses tanggal 28 Agustus 2016)

⁷ Garnijanto Bambang Wahjudi, "*Kerjasama Regional ASEAN Menghadapi Isu Terorisme Internasional*", Penanganan Aksi Teroisme Internasional di Filipinai Bagian Selatan Oleh ASEAN, hal. 84 Tahun 2000 dan 2001

⁸ Vermonte, Phillips, Regional Networking and coordination Againts International Terrorism: *An Indonesia Perspective. The 13th Meeting of CSCAP Working Group Meeting on Transnational Crime, Manila 27-28 Juni 2003.*

seperti aksi yang di terapkan oleh *Abu Sayyaf Group* dengan menculik dan meminta tebusan dengan maksud dan tujuan yang jelas di Filipina Selatan. Pada perkembangannya *Abu Sayyaf Group* ini dapat dinilai membahayakan keselamatan bagi warga dan kepentingan pihak lain. Dengan adanya kepentingan Amerika Serikat dalam melawan terorisme dan juga adanya kelompok terror di Filipina membuat kedua Negara ini sepakat untuk menjalin hubungan kerjasama dalam melawan aksi terror, yang dimana kerjasama tersebut terjalin baik secara ekonomi maupun militer.

Dari pemaparan diatas, penulis berupaya untuk menjelaskan proses dipilomasi antara Amerika Serikat dan Filipina dalam memberantas *Abu Sayyaf Group* di Filipina dalam suatu bentuk tesis dengan judul “Kebijakan Amerika Serikat Menghadapi *Abu Sayyaf Group* di Filipina Selatan (2001-2010)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis jelaskan di atas, maka rumusan masalahnya adalah:

Bagaimana Inisiatif Diplomasi Pemerintahan Amerika Serikat Dalam Memberantas *Abu Sayyaf Group* di Filipina Selatan (2001-2010)?

C. Literatur Review

Permasalahan mengenai kebijakan luar negeri Amerika Serikat sejak Tragedi 9/11 telah memberikan dampak perubahan yang amat signifikan terhadap perkembangan dan penetapan hukum di dunia, dimana serangan terror tertentu telah berhasil membawa persepsi bahwa ancaman dapat terjadi kapan saja dan dapat memicu suasana kerusuhan serta sulit untuk di prediksi dengan tepat.

Adapun dari aktivitas terorisme internasional menyebar ke berbagai kawasan dunia yang telah banyak diteliti. Khususnya, yang berkaitan dengan jaringan teroris di Filipina menyangkut perkembangan dan keamanan (*security*). Corak dominan yang penulis temukan dalam tulisan-tulisan tersebut berpendapat bahwa, Tragedi 11 September tahun 2001 telah memberikan dampak perubahan terhadap kebijakan luar negeri Amerika Serikat dari aktivitas-aktivitas terorisme sebelumnya, dan yang lebih berkelanjutan lagi akan dijabarkan dalam tulisan-tulisan dibawah ini, dan dinilai sebagai *continuity*, atau kelangsungan dalam penelitian.

Setelah beberapa saat serangan terhadap Tragedi 9/11, pemerintah Amerika Serikat langsung mengeluarkan laporan rutin dari Departemen Pertahanan Amerika Serikat, yaitu: “*Quadrennial Defense Review Report (QDR)*” pada tanggal 30 September 2001.⁹ Dan setelah setahun kemudian

⁹ Quadrennial Defense Report USA 2001, didapat dari: www.gao.gov/new.items/d0313.pdf, Internet (diakses tanggal 17 September 2016)

disusul dengan dikeluarkannya “*The National Security Strategy (NSS 2002)*”¹⁰ merupakan kebijakan dari strategi presiden George Walker Bush dalam menghadapi perubahan ancaman keamanan Amerika Serikat pada 9/11.

Transformasi cara pandang terhadap konsep strategi keamanan maupun pertahanan nampak terlihat jelas pada laporan QDR 2001 maupun di dalam NSS 2002. Bila dibandingkan sebelum masa presiden Bush menjabat sebagai pemimpin, yaitu pada masa presiden Bill Clinton menerapkan, kebijakan luar negeri Amerika Serikat memperhatikan isu-isu berkaitan dengan ekonomi, penegakan Hak Asasi Manusia (HAM), serta nilai-nilai demokrasi. Hal ini terlihat dalam laporan “*National Security Strategy (1999)*”.¹¹

Dapat dikatakan bahwa isu-isu keamanan presiden Bush lebih cenderung pada pendekatan menggunakan *hard power* dalam strategi baru, maka perkembangan baru dalam strategi keamanan dan pertahanan nasional Amerika Serikat akan diikuti juga dengan transformasi di bidang militer, serta perubahan dalam strategi kebijakan luar negerinya.

Dalam buku Dr. Abuza berjudul “*The Return Of The Abu Sayyaf*” yang membahas keterkaitan hubungan *Abu Sayyaf Group* dan Al-Qaeda, dimana Jamal Khalifa, saudara ipar Osama bin Laden, siap dikirim ke Filipina pada

¹⁰ *The National Security Strategy USA 2002*, didapat dari: www.state.gov/documents/organization/63562.pdf, Internet (diakses tanggal 13 September 2016)

¹¹ *A national security strategy 1999*, didapat dari: <https://clinton4.nara.gov/media/pdf/nssr-1299.pdf>, Internet (diakses tanggal 18 September 2016)

tahun 1991 dan mendirikan jaringan badan amal Islam.¹² Khalifa secara resmi menjadi direktur regional untuk amal yang berbasis di Saudi, *Islamic International Relief Organization* (IIRO), dan bertanggung jawab tidak sebatas proyek di Filipina tapi juga di Indonesia, Thailand, dan Taiwan.¹³ Keterkaitan ini mengharuskan Amerika Serikat untuk bertindak menanggulangi *Abu Sayyaf Group* dalam perkembangannya dengan jaringan transnasionalnya.

Adapun Jurnal Transnasional “*Isu Terorisme dan beban ancaman keamanan kawasan Asia Tenggara pasca runtuhnya WTC- AS*” Tjarsono Idjang, menjelaskan *Counter terrorism* merupakan kesepakatan bersama dan upaya kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah untuk melawan taktik, yang tidak begitu lama, tetapi memiliki penentuan jangka panjang dalam memerangi terror yang ditujukan kepada segala bentuk terror internasional yang telah menjadi perhatian seluruh dunia.¹⁴ Dalam hal ini, Amerika Serikat nampak menunjukkan tidak hanya sebatas berusaha untuk menangkap

¹² Khalifa's financial network, see Zachary Abuza, *Funding Terrorism in Southeast Asia: The Financial Network of al Qaeda and Jemaah Islamiyah*, *NBR Analysis*, Vol. 14, No. 5, Seattle: The National Bureau of Asian Research, December 2003, pp. 26-28.

¹³ The IIRO actually was established in 1978, but co-opted in 1979 by Saudi Arabian intelligence in order to serve as a financial conduit for Saudi, U.S., and Gulf-state funding to the Mujiheddin in Afghanistan. Through the 1980s, the IIRO legitimized itself and grew. It now has more than 30 offices, and its activities cover more than 75 countries. In the early 1990s, the IIRO decided to have separate directors for each of the countries, and Khalifa became the IIRO director for the Philippines. The IIRO claims to have begun charitable work in the Philippines in 1988, but according to documents registered at the Philippine Securities Exchange Commission (PSEC), the IIRO was legally incorporated in the Philippines on September 20, 1991, with offices in Makati and in several cities in Mindanao, including Cotabato and Zamboanga. Khalifa was listed as the IIRO's president and chairman of the board of trustees. Based on IIRO documents at the PSEC, Khalifa was one of five incorporators who signed the documents of registration; another was Khalifa's wife, Alice "Jameelah" Yabo. Dr. Adnan Khalil Basha, "Largest Islamic Relief Organization Maligned," Letter to the Editor, *Philippine Daily Inquirer*, August 2000, p.18; Christine Herrera, "Gemma Linked to Bin Laden Group Funding Sayyaf, MILF," *Philippine Daily Inquirer*, August 10, 2000.

¹⁴ Idjang Tjarsono, “*Isu Terorisme dan beban ancaman keamanan kawasan Asia Tenggara pasca runtuhnya WTC- AS*”. Dalam Jurnal Transnasional, Pekanbaru Vol. 04 No.01, Juli 2012

pemimpin Al-Qaeda maupun terhadap kelompok militannya yang dinyatakan oleh Amerika Serikat sebagai kelompok pelaku serangan pada 9/11, namun lebih jauh lagi Amerika Serikat memelopori agar masyarakat internasional berpartisipasi dalam perang melawan terorisme termasuk *Abu Sayyaf Group* di Filipina yang memiliki keterkaitan erat dengan jaringan Al-Qaeda.

Abu Sayyaf Group dianggap sebagai kelompok militan yang beroperasi di Filipina dan mempromosikan pendirian sebagai suatu negara Islam di wilayah Filipina Selatan yang berlokasi di Kepulauan Sulu dan Mindanao. *Abu Sayyaf Group* berdiri pada awal tahun 1990-an oleh Abdurajak Janjalani atau yang biasa disebut dengan Abu Sayyaf.¹⁵ *Abu Sayyaf Group* terlibat dalam berbagai tindak kekerasan, seperti pemboman, pembunuhan, penculikan, penyanderaan maupun pemerasan.¹⁶ Seperti kasus penyanderaan terhadap warga negara Amerika Serikat, Jeffrey Schilling yang diculik *Abu Sayyaf Group* pada 28 Agustus 2000 di Filipina.¹⁷

Selain pembahasan diatas, ada kemiripan dari berbagai pandangan sebelumnya seperti dalam buku Dr. Abuza. Yang menyampaikan bahwa ada keterkaitan antara *Abu Sayyaf Group* dan jaringan Al-Qaeda. Ada dua hal yang memperlihatkan indikasi tersebut. Hal *pertama* adalah permintaan Osama bin Laden yang mengutus seorang wakilnya untuk merekrut pejuang-

¹⁵ Sholahuddin, "NII sampai Ji, Salafy Jihadisme di Indonesia". Komunitas Bambu, hal. 25, Jakarta 2011

¹⁶ Abu Sayyaf Group "*Philippines, Islamist separatists*", didapat dari: <http://www.cfr.org/philippines/abu-sayyafgroup-philippines-islamist-separatists/p9235> Internet (diakses tanggal 27 Agustus 2016)

¹⁷ Inilah 15 Bukti Kekejaman Kelompok Abu Sayyaf "*Tidak Segan Penggal Kepala Sandera*", didapat dari: <http://kaltim.tribunnews.com/2016/04/08/inilah-bukti-sadisme-kelompok-abu-sayyaf-tidak-segan-penggal-kepala-sandera?page=4>, Internet (diakses tanggal 28 Agustus 2016)

pejuang Muslim dari Filipina untuk dilatih dan berperang di Afganistan. Hal *kedua* adalah kedatangan Mohammad Jamal Khalifa yang merupakan wakil dari Osama bin Laden ke Filipina untuk misi dalam mendirikan basis IIRO di Filipina.¹⁸ Hal ini yang menunjukkan adanya dukungan Osama bin Laden kepada *Abu Sayyaf Group* dan mempererat ikatan antara *Abu Sayyaf Group* dengan Al-Qaeda.

Sedangkan menurut Simon Reeve yang merupakan penulis dari “*The New Jackals: Ramzi Yousef, Osama bin Laden and the Future of Terrorism*” menyatakan, bahwa pada musim panas di tahun 1991 terjadi pertemuan antara Khalifa, Abu Sayyaf yang merupakan pendiri dari *Abu Sayyaf Group* dan Ramzi Ahmed Yousef yang merupakan pelaku peledakan bom di *World Trade Center* 1993 di Peshawar, Pakistan. (Berry, Curtis, Hudson, & Kollars, 2002, hal. 10). Pertemuan ini disinyalir sebagai forum diskusi di antara ketiga tokoh tersebut untuk membicarakan rencana Khalifa dalam mendelegasikan Yousef ke Filipina dan memberikan pelatihan militer serta perakitan alat peledak yang berdaya ledak tinggi kepada pejuang *Abu Sayyaf Group*. Sedangkan dalam pembahasan buku Moeflich Hasbullah, “*Asia Tenggara konsentrasi Baru Kebangkitan Islam*”, hal. 242”. Menjelaskan bahwa Al-Qaeda tidak sebatas hanya membantu dengan dukungan berupa

¹⁸ IIRO merupakan sebuah lembaga filantropis yang bergerak di bidang kemanusiaan yang dimiliki oleh Osama bin Laden. Didirikan di Filipina oleh tangan kanan yang juga merupakan saudara ipar Laden, Mohammad Jamal Khalifa. Lembaga ini diindikasikan sebagai lembaga pendanaan yang mendanai operasi terorisme oleh *Abu Sayyaf Group* yang dikamuflasekan sebagai lembaga pengumpul dana bantuan untuk membangun masyarakat Muslim).

finansial saja, namun juga telah memberikan berbagai pelatihan kemampuan militernya terhadap anggota-anggota *Abu Sayyaf Group*. Hal ini diperjelas oleh pernyataan dari pejabat Militer Filipina, mengatakan bahwa Abu Sayyaf menerima bantuan materil dan finansial dan juga latihan militer dari jaringan Al-Qaeda pimpinan Osama bin Laden sampai tahun 1995, dua kelompok tersebut terus menjalin hubungan kerjasama dalam menjalankan aksi-aksi kejahatan transnasional mereka.¹⁹

Berdasarkan dari berbagai peristiwa tersebut hipotesa mengenai kebijakan Amerika Serikat dalam memberantas *Abu Sayyaf Group* di Filipina dapat terbentuk. Hal ini didasari atas opini bahwa aksi-aksi yang terorganisir dan pelatihan yang diberikan oleh Yousef kepada anggota *Abu Sayyaf Group* dan ikut sertanya Abu Sayyaf di dalam perang Afganistan, menerapkan nilai-nilai radikal dan fatwa mengenai diperbolehkan menculik bahkan membunuh untuk dijadikan sumber dana anggaran pada aksi mereka.

D. Kerangka Pemikiran

Dalam melakukan rangkaian kerjasama antara pemerintah Amerika Serikat dengan Filipina menerapkan diplomasi yang lebih ditekankan secara bilateral yang dimana diplomasi tersebut dilakukan dalam kerangka *soft power* dan *economic power*. *Economic power* merupakan adanya hubungan

¹⁹ Moeflich Hasbullah, "Asia Tenggara konsentrasi Baru Kebangkitan Islam", Fokusmedia, hal. 242, Bandung 2003

diplomasi yang dilakukan antar negara dengan menggunakan bantuan ekonomi baik berupa sumbangan dana, sogokan atau suap yang diberikan sebagai bagian dari bujukan dan paksaan untuk mematuhi atau melaksanakan ketetapan maupun strategi yang akan dipatuhi dan dilakukan secara bersama. Dalam hal ini Amerika Serikat turut memberikan dukungan dana finansial kepada pemerintah Filipina yang digunakan bersama-sama dalam memerangi terorisme.²⁰ Selain dalam bentuk *economic power*, diplomasi yang dilakukan antara Filipina dengan Amerika Serikat menggunakan *soft power* yang dimana berbeda dengan yang dilakukan terhadap Irak dan juga Afganistan yang menggunakan pendekatan *hard power*. Seperti dengan *economic power*, *soft power* digunakan dalam berdiplomasi sebagai suatu bujukan dan desakan yang dilakukan secara halus melalui penerapan dan pertukaran nilai-nilai dan budaya bersama yang dituangkan ke dalam suatu kerangka kerjasama tanpa melibatkan serangan militer. Hal ini juga berlaku dan sama dengan diplomasi oleh Indonesia, Amerika Serikat, Filipina dalam memerangi terorisme dimana dalam melakukan diplomasi Amerika Serikat memberikan dukungan penuh untuk menemukan ide bersama, melakukan kerjasama dalam melawan terorisme yang merupakan menjadi ancaman bagi keamanan global.

²⁰ *Economic Diplomacy and Economic Security*, didapat dari:
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1436584, Internet (diakses tanggal 20 September 2016)

E. Kerangka Teoritik

Dalam penelitian Tesis ini, penulis lebih menekankan pada penggunaan teori atau Konsep Terorisme yang dipaparkan oleh berbagai pakar, dengan alasan bahwa teori tersebut cukup memadai untuk mengorganisasikan dan menata fakta yang penulis teliti adalah “Kebijakan Amrika Serikat Menghadapi Kelompok Abu Sayyaf di Filipina Selatan (2001-2010)”. Untuk dapat menganalisa lebih jauh persoalan yang akan dibahas, maka penulis memerlukan kerangka dasar teori sebagai pegangan pokok secara umum adalah:

Konsep Terorisme

Terkait dengan terorisme, memang hingga pada akhir ini tidak ada informasi mengenai definisi yang disepakati secara kolektif untuk penggunaan terorisme. Namun dari berbagai kalangan pakar sosial dan politik barat memiliki kesepakatan dalam mendefinisi atau menjelaskan tentang terorisme. Terror atau Terorisme tidak selalu identik dengan kekerasan. Arti terror atau dalam bahasa Perancis, *terreur* merupakan arti yang biasa digunakan para pejuang revolusi perancis terhadap tindakan pembunuhan, kebuasan maupun anarkis, yang dilakukan tanpa melakukan proses peradilan pada saat revolusi perancis berlangsung antara tahun 1793

hingga 1794.²¹ Selain itu, terorisme didefinisikan sebagai usaha-usaha atau aktivitas untuk menciptakan rasa takut yang mendalam melalui upaya-upaya pembunuhan, pemboman, perusakan, penghacuran secara tiba-tiba, penculikan atau penyanderaan dan tindakan kekerasan yang lainnya, yang biasanya menimbulkan korban terhadap masyarakat sipil yang tidak bersalah.

Memang dalam mendefinisikan terorisme merupakan persoalan yang rumit, karena ia identik dengan masalah moral, serta cara penilaianpun berbeda-beda dari pandangan tiap orang maupun berbagai pihak. Definisi tentang terorisme juga telah di upayakan oleh berbagai kalangan, terutama pihak Amerika Serikat yang sangat berkeinginan atau kepentingan terhadap *War on Terrorism*.²²

Berdasarkan literatur ilmu politik, politik teror memiliki empat komponen yaitu: *Pertama*, kekerasan adalah merupakan bagian yang dibutuhkan dalam membuat aksi politik. Apalagi kekerasan yang berbentuk secara dramatis, menjadi strategi yang dianggap paling efektif untuk merebut perhatian dunia. Semakin dunia memberi perhatian, semakin sukses aksi politik terror. Pesan politik yang ingin ditunjukkan mereka dapat disampaikan lebih meluas dan merasa sukses ketika perhatian

²¹ Sejarah Revolusi Perancis, didapat dari: <http://www.zonasiswa.com/2015/07/revolusi-perancis-latar-belakang-proses.html> Internet (diakses tanggal 13 Oktober 2016).

²² Drs. Sudarto, Manajemen Krisis Dalam Menanggulangi Terorisme, didapat dari: <https://www.kemhan.go.id/2012/05/23/manajemen-krisis-dalam-penanggulangan-terorisme.html>, Internet (diakses tanggal 21 September 2016)

publik dapat diraih.

Kedua, menggunakan tujuan dengan menghalalkan segala cara. Seringkali dibalik terror berbagai aksi terror ada tujuan mulia. Tujuan itu digunakan dapat berupa misi ideologi, bahkan keagamaan. Kemungkinan juga tujuannya adalah bagian dari kepentingan politik dari suatu kelompok yang tertindas untuk dapat meraih apa yang menjadi hak mereka. Namun politik terror menghalalkan segala cara sejauh itu dapat efektif untuk mencapai tujuan mereka. Bahkan jika untuk mencapai tujuan tersebut itu, diperlukan korban manusia, termasuk korban dari rakyat tidak berdosa, itupun dapat di tempuh.

Komponen yang *Ketiga* adalah gerakan terselubung. Aksi terror dilakukan dalam sebuah kelompok jaringan kerja yang secara sengaja disembunyikan di bawah permukaan. Mereka tidak mempercayai bahwa mekanisme politik konvensional dapat memenuhi tercapainya aspirasi politik yang mereka perjuangkan. Politik non konvensional dipilih karena dianggap satu-satunya mekanisme yang tersedia untuk turut bicara dan didengar.

Keempat, militansi dan fanatisme dari dalam diri pelaku. Berbeda dengan politik konvensional, politik terror di dukung personel yang tingkat militansinya amat tinggi. Apalagi jika misi utama dari kelompok itu berwarna keagamaan atau kemerdekaan sebuah bangsa. Aksi nekat yang

berakhir dengan kematian dari pelaku seperti bunuh diri adalah hal yang biasa.²³

F. Hipotesa

Berdasarkan pada rumusan masalah dan mengacu pada kerangka teori yang penulis ajukan, penulis merumuskan hipotesa bahwa hasil kerjasama bilateral antara pemerintah Amerika Serikat dan pemerintah Filipina untuk menghadapi *Abu Sayyaf Grup* dengan cara:

1. Amerika Serikat memberi dana bantuan ekonomi (*Economic Support Funds*) serta dukungan perangkat militer kepada pemerintah Filipina sebagai penunjang untuk memberantas pelaku terror.
2. Menerapkan peningkatan konsolidasi, kohesivitas dan efektivitas dalam kerjasama dengan Filipina.
3. Amerika Serikat memeberi bantuan pasukan dengan jumlah kurang lebih 660 personil yang terdiri dari 160 pasukan khusus, ditambah dengan 500 personil pendukung untuk melatih Angkatan Bersenjata Filipina.

²³ Meriam Budiardjo, "Teror dalam Tatanan Struktur Politik" PT. Gramedia, hal 52, Jakarta 2001

4. Menerapkan pendekatan sosial dan budaya untuk memperkuat dukungan publik dan politik domestik, maupun memulihkan perekonomian di Pulau Sulu.

G. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

- a) Ingin menjelaskan dan mengetahui Bagaimana Inisiatif Diplomasi Amerika Serikat dan Filipina Dalam Memberantas *Abu Sayyaf Group* di Filipina Selatan (2001-2010).
- b) Untuk mengetahui dan menjelaskan perkembangan, tantangan dan peluang Amerika Serikat dalam menghadapi *Abu Sayyaf Group* di Filipina Selatan.

2. Manfaat Penelitian

- a) Dalam tujuan penelitian ini, apakah dapat tercapai, maka penelitian berharap dapat berguna bagi pemerintah Indonesia dalam melihat perkembangan terorisme internasional saat ini, dan dapat dijadikan referensi dalam antisipasi, penanganan maupun sebagai pencegahan masuknya kelompok jaringan terorisme internasional di Indonesia.

- b) Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan acuan untuk masalah-masalah terorisme internasional, khususnya bagi para penstudi Ilmu Hubungan Internasional dalam rangka pengembangan Ilmu Hubungan Internasional.

H. Jangkauan Penelitian

Batasan penulisan atau jangkauan penelitian dalam sebuah penelitian sangat diperlukan. Dalam hal ini, untuk menghindari adanya penyimpangan pembahasan dan pembuktian terhadap hipotesa dan pokok permasalahan yang telah diajukan. Lebih jauh, pembatasan dimaksudkan agar obyek penelitian menjadi jelas dan spesifik, agar permasalahan dan kajian tidak melebar dari wacana yang telah ditetapkan.

Dalam penulisan Tesis ini, penulis akan membatasi kajian pada bagaimana inisiatif diplomasi Amerika Serikat dan Filipina dalam memberantas *Abu Sayyaf Group* di Filipina Selatan (2001-2010). Yaitu hanya berkisar kepada bentuk pernyataan, aktivitas, dan pola kebijakan di internasional maupun internal, serta keterkaitan kelompok-kelompok terror yang berada di Filipina.

Disini, Amerika Serikat adalah berupaya menerapkan kebijakannya untuk melindungi warganya serta kepentingan-kepentingannya di Filipina. Dan mewujudkan dalam kerangka *soft power* dan *economic power* untuk

memberantas *Abu Sayyaf Group* di Filipina, oleh karena itu penulis akan mencoba menjelaskan fenomena tersebut.

Secara periodik, penelitian ini akan mengkaji lebih jauh awal mula munculnya kelompok terror di Filipina serta dinamika kebijakan Amerika Serikat memberantas *Abu Sayyaf Group* di Filipina Selatan.

I. Methodologi Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, dimana penulis mencoba untuk menggambarkan dan menjelaskan tentang Kebijakan Politik Luar Negeri Amerika Serikat terhadap *Abu Sayyaf Group* di Filipina dan keterkaitannya dengan kelompok jaringan terror lainnya.

2. Sumber dan Jenis Data

Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah data sekunder. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa dokumen, buku, jurnal, dan internet dll. Data yang sesuai dengan pembahasan dalam penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kajian pustaka yaitu dengan mengumpulkan data dan informasi dari literatur yang berkaitan dengan masalah yang di bahas.

4. Teknik Analisa Data

Teknik analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Dimana, data yang dikumpulkan melalui penelitian lapang dilakukan dengan metode kualitatif, karena sifat data penelitian ini merupakan informasi kualitatif. Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun yang terucapkan langsung dari para pelaku yang diamati penelitian, sehingga pada riset tesis ini merupakan hasil sendiri dan tidak mengandung unsur plagiarism.

5. Definisi Operasional

Untuk menghindari salah penafsiran terhadap berbagai istilah atau konsep yang digunakan dalam penelitian ini, maka beberapa istilah atau konsep diberi batasan pengertian dalam bentuk definisi operasional:

1. Politik luar negeri merupakan hasil akhir dari kepentingan nasional yang tidak dapat dipisahkan dari kondisi-kondisi

nyata dalam negeri. Politik luar negeri cenderung dimaknai sebagai sebuah identitas yang menjadi karakteristik pembeda suatu negara dengan negara-negara lain yang ada di dunia. Politik luar negeri adalah paradigma besar yang dianut sebuah negara tentang cara pandang negara tersebut terhadap dunia.

2. Amerika Serikat merupakan sebuah negara yang saat ini menjadi salah satu aktor utama dalam perang global melawan terorisme berdasarkan atas resolusi DK-PBB 1373 tentang: Setiap negara harus ikut berperan serta dalam perang global melawan aksi terror.
3. Terorisme secara akademik merupakan segala bentuk aksi tindak kejahatan berbagai bentuk, seperti pemberontakan, pemboman, pembantaian, penyanderaan, demonstrasi berdarah. Secara birokrasi merupakan tindakan yang ditujukan langsung kepada negara dengan maksud menciptakan bentuk terror terhadap orang-orang tertentu atau kelompok orang atau masyarakat luas. Terorisme Internasional adalah terorisme yang dilakukan dengan dukungan pemerintah atau organisasi asing dan atau diarahkan untuk melawan negara, lembaga, atau pemerintah asing.

J. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan, penelitian tesis ini terdiri dari beberapa bab dan sub bab yang akan diuraikan sebagai berikut:

Bab I pendahuluan, akan menjelaskan Latar Belakang Masalah kenapa penelitian ini dilakukan, yang mana dari situ kemudian dapat disimpulkan rumusan masalahnya. Bab ini juga dilengkapi dengan beberapa sub bab yang menerangkan kerangka teori dan konsep yang digunakan dalam penelitian ini, hipotesa, serta batasan penelitian. Sedangkan Bab II Tinjauan Pustaka (Dasar-Dasar Politik Luar Negeri Amerika Serikat di Filipina), penelitian akan mengambil fokus kajian pada pemaparan kebijakan Amerika Serikat yang berkaitan dengan faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan dan dasar untuk menjelaskan perilaku suatu Negara, dalam hal ini adalah Amerika Serikat. Dan Bab III akan memaparkan Awal Mula Munculnya *Abu Sayyaf Group* dan kelompok terror di Filipina Selatan, penelitian akan mengambil fokus kajian pada pemaparan *Abu Sayyaf Group* yang berkaitan dengan penerapan kebijakan Amerika Serikat menghadapi *Abu Sayyaf Group* adalah: Konsep Terorisme untuk menjelaskan aktivitas kelompok teroris, dalam hal ini adalah *Abu Sayyaf Group*. Dan fokus pembahasan lebih ditekankan pada temuan dan hasil penelitian dari berbagai peristiwa dan perkembangan. Selanjutnya Bab IV hasil penelitian, pada hasil penelitian akan mengambil fokus kajian Berbagai Kebijakan Amerika Serikat Dalam Menghadapi *Abu*

Sayyaf Group di Filipina, serta peran Amerika Serikat dalam mengatasi munculnya terorisme di Filipina. Dan terakhir adalah Bab V kesimpulan, yang berisi kesimpulan dari penelitian ini.